

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus pada Program Pembinaan Kemandirian)

Elsa Sari¹, Agus Surya Dharma², Jumaidi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail : elsasr2002@gmail.com

ABSTRAK

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi di masyarakat dan tidak mengulangi tindakan pidana. Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dan dilakukan oleh petugas dengan ilmu khusus. Penelitian ini menjelaskan implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan terimplementasi cukup baik. Beberapa indikator yang masih belum terimplementasi termasuk kurangnya SDM petugas, fasilitas dan alat yang kurang memadai, kurangnya waktu pembinaan kemandirian yang bermasalah pada aturan, kurangnya anggaran dan insentif, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan implementasi program pembinaan, disarankan kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk berkoordinasi dengan pegawainya dalam pembuatan anggaran dan melibatkan stakeholder. Warga binaan juga diharapkan mendukung petugas lapas dalam program pembinaan kemandirian.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pembinaan, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The formation program in prisons aims to enable prisoners to adapt in society and not repeat criminal acts. Coaching is a major aspect of the correctional system and is carried out by officers with special knowledge. This study describes the implementation of the coaching program at Amuntai Class IIB Penitentiary. The research method used is qualitative descriptive with data collection through observation, interviews, and documentation. The results showed that the coaching program was implemented quite well. Some indicators that are still not implemented include lack of human resources for officers, inadequate facilities and tools, lack of time for self-reliance development that is problematic with rules, lack of budget and incentives, and limited facilities and infrastructure. To improve the implementation of the coaching program, it is recommended to the head of the prison to coordinate with his employees in budgeting and involving stakeholders. Assisted residents are also expected to support prison officers in self-reliance development programs.

Keywords: Implementation, Coaching Program, Hulu Sungai Utara

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana merupakan aktivitas untuk mengembangkan kualitas narapidana dalam berbagai aspek seperti ketaqwaan terhadap Tuhan, intelektual, moral, akhlak, keterampilan, kesehatan jiwa dan raga, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana dapat beradaptasi di masyarakat dan tidak mengulangi tindakan pidana. Namun, masih terdapat kekurangan dalam upaya mencegah pengulangan kejahatan. Pentingnya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan diakui sebagai salah satu cara untuk meminimalisir tindak kejahatan pada narapidana. Pembinaan harus dilakukan dengan baik dan profesional oleh petugas yang memiliki ilmu khusus dalam bidang tersebut.

Dalam pembinaan, perlu ada pengarahan untuk memperoleh keterampilan tertentu demi mencapai tujuan organisasi. Tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah membuat narapidana sadar akan kesalahan mereka, tidak mengulanginya, dan dapat aktif dalam membangun negara serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Agar tujuan pembinaan tercapai, diperlukan fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Namun, dalam kenyataannya, pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbatas oleh jumlah petugas pembinaan yang berkualifikasi tinggi dan jumlah narapidana yang semakin meningkat.

Pada saat pembinaan, narapidana diberikan program pembinaan untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian. Bimbingan kepribadian bertujuan agar narapidana memiliki tingkah laku yang lebih baik melalui interaksi dengan orang lain. Sedangkan bimbingan kemandirian dirancang untuk mengembangkan diri narapidana sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Salah satu program pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai adalah program pembinaan kemandirian, yang mengasah keterampilan dan skill narapidana untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, ada regulasi yang mengatur persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Narapidana yang telah menjalani separuh masa pidananya dapat mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas. Beberapa kegiatan pelatihan kerja yang diterapkan di Lapas Kelas II B Amuntai antara lain pelatihan barber, pertanian hidroponik, perikanan, cuci mobil & motor, meubel, dan laundry.

Dalam kegiatan pembinaan kemandirian, bidang keterampilan yang paling banyak diminati oleh narapidana adalah meubel. Program pembinaan kemandirian meubel dilakukan dengan menghasilkan produk meubel yang ditawarkan kepada orang yang berminat membeli. Namun, minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian tersebut cenderung rendah, yang berdampak pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah mereka bebas.

Dalam menjalankan pembinaan kemandirian, Lapas Kelas IIB Amuntai menghadapi sejumlah kendala. Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya pengarahan petugas, kurangnya instruktur tetap, dan kekurangan SDM merupakan beberapa masalah yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan. Kendala tersebut perlu diatasi agar pembinaan kemandirian dapat dilakukan secara optimal.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai” meneliti masalah yang sama dengan penelitian pendahulu. Dwi Putra Herliansyah (2020) melakukan penelitian tentang pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui kewirausahaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan pembinaan wirausaha. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan

teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. (Herliansyah, 2020). Peneliti lain, Nita Devita Purba (2019), meneliti implementasi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Purba, 2019)

Kesimpulan dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana baik untuk narapidana dewasa maupun narapidana anak berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan diatasi oleh peneliti dan petugas yang terlibat dalam pembinaan narapidana.

Implementasi Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik diungkapkan oleh Jones (1980), dimana implementasi diartikan sebagai “*getting a job done*” dan “*doing a*”, tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Tachan menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus ada, yaitu unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Kelompok sasaran terdiri dari orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang dipengaruhi oleh kebijakan. Karakteristik kelompok sasaran seperti ukuran kelompok, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, usia, dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi efektivitas implementasi. Untuk memahami implementasi kebijakan publik, perlu diketahui variabel atau faktor penentunya. Beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Mayes, 2012)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami keadaan latar belakang atau kondisi kasus yang dialami dalam melakukan pendekatan terhadap narapidana di lapas kelas IIB Amuntai. Tipe penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan mengamati, mengumpulkan, menganalisis data, dan mengungkapkan implementasi pembinaan terhadap narapidana untuk pemulihan mereka kembali ke masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari informan terkait dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan, dokumen resmi, surat kabar, internet, dan jurnal yang mendukung penelitian. Sampel sumber data diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan mencari informan yang memahami dan mengetahui hal yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengkategorikan, menjelaskan, menyusun pola, memilih yang penting, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. (Wahyuningsih, 2013)

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan agar dapat dipahami oleh pihak lain. Ada dua jenis komunikasi, yaitu lisan dan nonverbal. Komunikasi memiliki beberapa bentuk, seperti interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Tujuannya adalah mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antarindividu atau kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator transmisi informasi dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang petugas lakukan sudah terimplementasi dengan baik dan dapat dipahami oleh narapidana maupun keluarga wargabinaan diterima dengan baik. Pada indikator kejelasan informasi dapat disimpulkan bahwa untuk kejelasan informasi yang petugas berikan tidak hanya dengan spanduk atau banner yang terpasang di setiap blok kamar karenanya banyak narapidana masih belum bisa memahami atau tidak bisa membaca tulisan sehingga itu membuat mereka kesulitan menerima informasi dan walaupun petugas juga menyampaikan secara langsung tetapi masih juga kurang terimplementasi dikarenakan instruktur tetap dari petugas tidak ada sehingga informasi yang di sampaikan menjadi berbeda-beda.

Pada indikator konsistensi informasi dapat disimpulkan bahwa mengenai konsistensi petugas sudah terimplementasi dengan baik dalam memberikan arahan dan secara rutin memberi arahan atau informasi ke setiap kamar narapidana dan saat pembinaan berlangsung pun petugas mendampingi agar apapun yang belum jelas dapat langsung bertanya kepada petugas sehingga pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (2014:250)

Sumber Daya

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya, seperti yang dikatakan George C. Edward III.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator staff dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIB Amuntai masih kurang baik, dimana hanya terdapat yang bertugas untuk menjadi pembina dalam pembinaan kemandirian tersebut dan tidak adanya staff khusus untuk bertugas menjadi instruktur tetap pembinaan kemandirian. Pada indikator fasilitas disimpulkan bahwa dalam sumberdaya khususnya pada sarana prasarana dalam program pembinaan kurang optimal. Dimana ada beberapa alat yang kurang sehingga alat yang ada sebisa mungkin di pakai untuk mengganti alat yang tidak ada dan menggunakan alat tersebut secara bergantian hal itu membuat para narapidana yang menjalankan program pembinaan menjadi terkendala di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Amuntai. Kemudian pada indikator waktu dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan waktu yang di gunakan belum terimplementasikan hanya 2 jam pembinaan sehingga itu menjadi kendala dan membuat beberapa pekerjaan yang warga binaan menjadi di kejar waktu karena adanya benturan dari aturan. Kemudian pada indikator insentif/anggaran dapat disimpulkan bahwa insentif atau anggaran yang petugas ajukan ditahun ini berkurang, menjadi kendala untuk pembelian alat sehingga pada indikator ini bisa di katakan cukup terimplementasikan, untuk pekerjaan yang para narapidana lakukan selalu dapat upah setiap pekerjaan mereka selesai tetapi ada juga yang tidak di upah.

Sikap Pelaksana

Disposisi dan sikap pelaksana akan menghambat implementasi kebijakan jika personil tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan personil yang memiliki dedikasi pada kebijakan penting.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator kejujuran dapat disimpulkan bahwa pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Amuntai petugas harus memiliki sikap kejujuran itu sangat penting dalam hal melakukan pekerjaan dan petugas harus profesional dalam menjalankan tugas tidak membedakan satu sama lain, pada indikator komitmen yang tinggi dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa mengenai komitmen dalam pembinaan kemandirian yang ada pada lapas sudah terimplementasi dengan baik, dilihat dari komitmen kalapas dan pegawainya yang akan terus-menerus memberikan pembinaan dengan baik. Selain itu komitmennya juga dapat dilihat pada instagram lapas yang selalu memposting setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kalapas dan pegawainya dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam mengarahkan pembinaan dengan sepenuh hati kepada narapidana, agar menciptakan kegiatan pembinaan yang

nyaman dan berjalan dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (2014:250).

Struktur Birokrasi

Meskipun sumber dan pengetahuan implementor cukup, kebijakan belum terimplementasi karena struktur birokrasi yang tidak efisien yang menjadi hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator standar operating procedures (SOPs) dapat disimpulkan bahwa Standar Operating Procedures (SOPs) diberlakukan oleh petugas sesuai dengan yang ada para narapidana pun merasakan dalam pembinaan yang di jalankan petugas sesuai dengan prosedur dan sudah terimplementasi dengan baik tidak ada yang menyeleweng dari aturan, dan petugas tidak melakukan pungli terhadap narapidana. Kemudian pada indikator fragmentasi dapat disimpulkan bahwa fragmentasi yang petugas berikan sudah terimplementasi dengan baik dan di bagi masing-masing kemampuan dan tidak ada masalah soal itu karena para petugas sudah menanyakan kepada narapidana apa kemampuan dan apa yang mau diikuti dalam pembinaan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (2014:250)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Program Pembinaan Kemandirian)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Progam Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Program Pembinaan Kemandirian) terdiri atas Faktor Penghambat yaitu: Pertama, kurang petugas dan tidak adanya instruktur tetap dari petugas. Kedua, Masih kurangnya sarana dan prasarana pembinaan. Ketiga, Keterbatasan waktu dalam pembinaan kemandirian

Sedangkan Faktor Pendorong yaitu: Pertama, Mendatangkan dinas terkait untuk memberikan pelatihan. Kedua, Menambah pengetahuan dan keterampilan narapidana.

SIMPULAN

Implementasi Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum optimal karena beberapa indikator terkait pembinaan kemandirian belum terlaksana. Masalah utamanya adalah kurangnya staf di lembaga pemasyarakatan, fasilitas yang tidak memadai, kurangnya waktu pembinaan, serta anggaran yang tidak mencukupi. Kurangnya sumber daya manusia dan instruktur tetap menyebabkan kurangnya bimbingan bagi warga binaan. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam menjalankan program secara maksimal. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya sarana dan prasarana pembinaan. Namun, terdapat juga faktor pendorong seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan narapidana.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Progam Pembinaan di Lapas Kelas IIB Amuntai, beberapa saran diberikan. Pertama, kepala lapas dan pegawai harus berkoordinasi dalam pembuatan anggaran dan mengikuti standar operasional prosedur untuk menjalankan program dengan baik. Mendorong pengembangan inovasi warga binaan dan meningkatkan keterampilan narapidana juga penting. Kedua, kepala lapas harus bekerja sama dengan stakeholder atau pihak ketiga yang memiliki pemahaman dalam bidang pembinaan, untuk memudahkan arahan pembinaan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh warga binaan ke masyarakat. Hal ini akan membantu lapas fokus pada pengembangan program kemandirian. Terakhir, warga binaan juga diharapkan ikut serta dalam mensukseskan implementasi program pembinaan dengan mendukung petugas lapas dan meningkatkan program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Herliansyah, D.P. (2020) 'Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.1977>.
- Mayes, M.D. (2012) 'Principles of Management', in *Scleroderma*. Boston, MA: Springer US, pp. 571–576. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5774-0_47.
- Purba, N.D. (2019) 'Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Samarinda'.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Wahyuningsih, S. (2013) 'Metode penelitian studi kasus: Konsep, teori pendekatan Psikologi Komunikasi, dan contoh penelitiannya'. Madura: UTM Press.